

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG TANGGUNG
JAWAB AHLI WARIS DI BAWAH UMUR ATAS PELUNASAN
PEMBIAYAAN AKAD *MUSHARAKAH* ORANG TUANYA
PADA BANK SUMUT SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh

Putri Gita Cahyani

NIM. C92215126



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Putri Gita Cahyani

NIM : C92215126

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Di Bawah Umur Atas Pelunasan Pembiayaan Akad Mushārahakah Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 April 2019

Saya yang menyatakan,



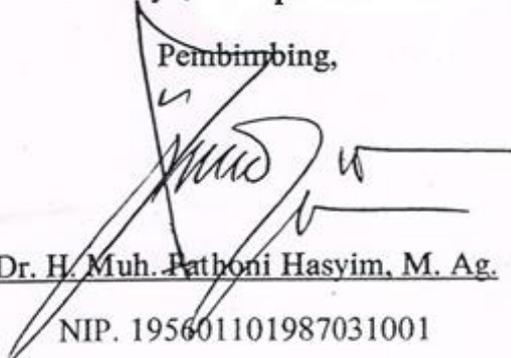
Putri Gita Cahyani
NIM: C92215126

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Putri Gita Cahyani NIM. C92215126 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunasaqahkan.

Surabaya, 05 April 2019

Pembimbing,



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.

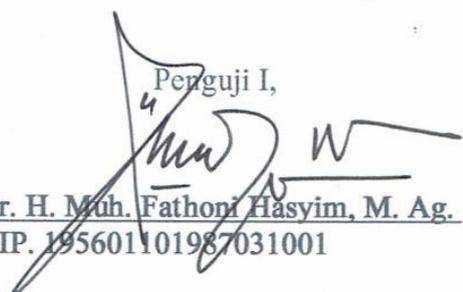
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

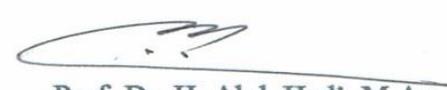
Skripsi yang ditulis oleh Putri Gita Cahyani NIM. C92215126 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Selasa, 09 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

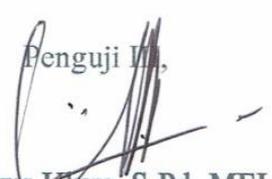
Penguji I,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.
NIP. 195601101987031001

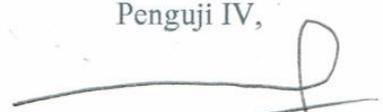
Penguji II


Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III,


Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEL.
NIP. 197209062007101003

Penguji IV,


Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 11 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Gita Cahyani
NIM : C92215126
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : gitaza27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)
Yang berjudul:

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris di Bawah Umur atas Pelunasan Pembiayaan Akad Musharakah Orang Tuanya pada Bank Sumut Syariah.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2019

Penulis,

Putri Gita Cahyani

pada tanggal 26 April 2011. Akad pembiayaan *mushārahah* dengan Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tersebut digunakan oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap untuk penambahan modal kerja sejumlah pembiayaan *mushārahah* sebesar Rp. 700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

Dalam perjanjian pembiayaan *mushārahah* tersebut melibatkan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar GunungTua tanggal 07 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap.

Selanjutnya pada saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan *mushārahah* dari almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan II, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Ongku Sutan Harahap meninggal dunia karena sakit di Gunung Tua. Hal ini menyebabkan terhentinya atau tertunggaknya pembiayaan *mushārahah* almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Sejatinya setiap manusia menginginkan bisa melakukan kegiatan ekonominya secara tuntas. Namun tidak ada yang dapat memprediksi kapan batas waktu terakhir ia menghembuskan nafasnya. Namun ketika kematian datangnya lebih awal sebelum berakhirnya akad, lalu bagaimana keadaan akad tersebut?

Pada tanggal 22 Mei 2012, dimana pada Surat Peringatan Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya menegaskan tunggakan pembiayaan

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Sejauh ini ada banyak peneliti yang membahas tentang berakhirnya akad *mushārahah*. Namun sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan *mushārahah* orang tuanya, atau yang sama dengan penulis bahas. Berikut ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang hampir sama dengan permasalahan yang diteliti penulis:

1. Skripsi dengan judul "Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep *Shirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", ditulis oleh Modakir Soleh (13220048), mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017.

Skripsi yang ditulis oleh Modakir Soleh ini membahas tentang perbandingan konsep persekutuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konsep *Shirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pembahasan skripsi ini terdapat tiga pembahasan.

Pertama yakni tentang konsep perbandingan hukum, di antaranya yaitu pengertian perbandingan hukum, kegunaan atau manfaat perbandingan hukum. *Kedua* adalah konsep persekutuan, meliputi pengertian persekutuan, pendirian persekutuan, aspek hubungan internal

dalam hukum perdata, unsur-unsur persekutuan, pembagian keuntungan dan kerugian, syarat-syarat persekutuan, jenis-jenis persekutuan, dan berakhirnya atau bubarnya persekutuan. *Ketiga* adalah tentang konsep *shirkah*, meliputi pengertian *shirkah*, dasar hukum *shirkah*, syarat-syarat dan rukun *shirkah*, macam-macam *shirkah*, dan berakhirnya *shirkah*.

Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menyinggung tentang berakhirnya akad *mushārahah*. Mudhakhir Sholeh menguraikan perbedaan antara konsep persekutuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konsep *Shirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konsep *Shirkah* tersebut menyangkut tentang bagaimana berakhirnya *shirkah* yang mana pembahasan tersebut hampir sama dengan skripsi penulis. Karena dalam skripsi yang diteliti oleh penulis terdapat kasus tentang meninggalnya nasabah dalam akad *mushārahah*. Dalam kasus ini juga membutuhkan penjelasan tentang diperbolehkannya meneruskan atau memberhentikan akad *mushārahah* apabila terdapat nasabah yang meninggal dunia.

Sedangkan perbedaan skripsi yang ditulis oleh Mudhakhir Soleh dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Mudhakhir Soleh ini menguraikan perbedaan konsep persekutuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konsep *Shirkah* dalam Kompilasi Hukum

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang akad *mushārahah*. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, di antaranya yaitu pengertian *mushārahah*, *landasar mushārahah*, *rukun dan syarat mushārahah*, *jenis-jenis mushārahah*, *skema mushārahah*, dan berakhirnya akad *mushārahah*.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi hasil penelitian yang meliputi deskripsi Putusan Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad *mushārahah* orang tuanya pada bank Sumut syariah. Serta latar belakang dari putusan Mahkamah Agung perkara Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn tersebut.

Bab keempat, berisi tentang analisis tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Tanggung Jawab Ahli Waris di Bawah Umur atas Pelunasan Pembiayaan Akad *Mushārahah* Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah Yang mana semua itu melibatkan kompilasi hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Kitab Undang-undang hukum perdata.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh. Sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.

ditempatkan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati di awal kontrak. Para mitra usaha bertindak sebagai kuasa dari kemitraan itu, bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab secara bersama-sama.

- c. *Shirkah Wujuh*, yakni akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi deuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *shirkah wujuh*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.
- d. *Shirkah A'mal*, yakni kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *shirkah a'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya adalah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerjasama usaha dalam *shirkah a'mal* akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.

- e. *Shirkah muḍārabahl*, yakni kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.

E. Skema Akad *Mushārahah*

Dalam pembiayaan akad *mushārahah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari seluruh total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan sisanya 30% berasal dari nasabah. Pembagian keuntungan, tidak harus dihitung sesuai dengan porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah, dan
- i) Ekonomi Syari'ah

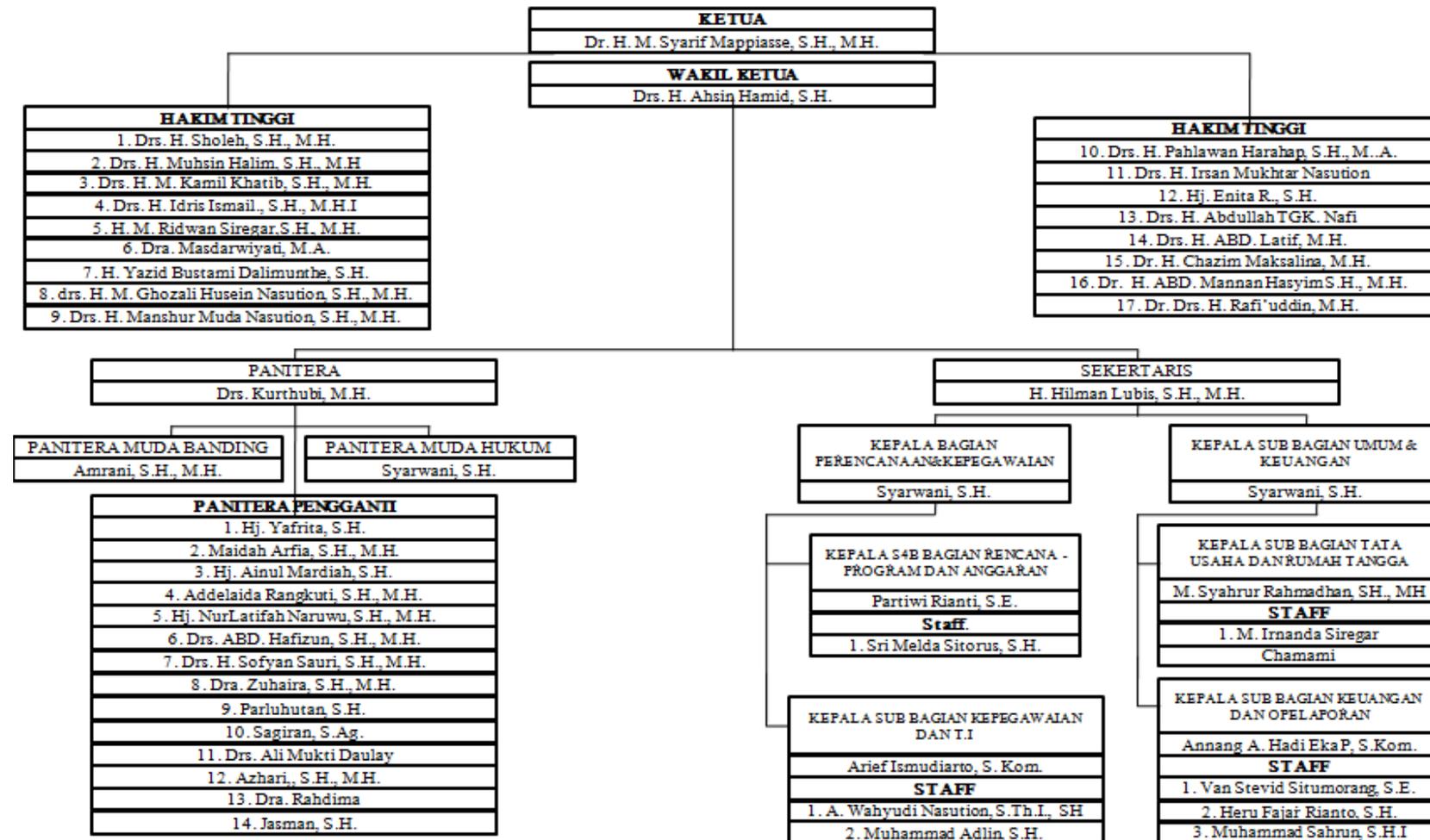
Selain itu Pengadilan Tinggi Agama juga memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Banding.
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f) Fungsi Lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam dan lain-lain.
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.³⁷

³⁷ _____. "Profil Pengadilan Tinggi Agama Medan", dalam <https://www.pta-medan.go.id/index.php/12-tentang-pta-medan/profil-pta-medan>, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 02 April 2019, Pukul 22.00

8. Struktur Kepengurusan Pengadilan Tinggi Agama Meda



Kemudian PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut mengirimkan beberapa surat peringatan. Surat Peringatan Pertama pada tanggal 3 Februari 2012 menyatakan bahwa tunggakan pembiayaan almarhum Ongku Sutan Harahap pada PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut sebesar Rp752.000.000,00. Lalu Surat Peringatan Kedua dikirim lagi pada tanggal 27 Maret 2012, dan Surat Peringatan Ketiga (terakhir) pada tanggal 22 Maret 2012.

Ketika telah sampai surat peringatan yang ketiga, Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap merasa keberatan. Surat Peringatan Ketiga tersebut menegaskan bahwa mereka harus menyelesaikan tunggakan tersebut. Tergugat sudah memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan paling lambat tanggal 25 Juni 2012. Jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka agunan yang telah diserahkan kepada PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut akan diajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan.

Perpanjangan waktu yang diberikan oleh PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut tersebut dikarenakan ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap dinilai belum menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan pembayaran walaupun berkali-kali dilayangkan Surat Peringatan.

Menurut Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap, surat peringatan yang dibuat PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut yang

ditujukan kepada Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap menyatakan bahwa ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap harus melanjutkan, dan melunasi pembiayaan *Mushārahah* yang dikucurkan atau dicairkan oleh Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap tersebut bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan Nash Shar'i dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena dianggap sangat merugikan Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap.

Oleh karena itu Ibu dari Alm. Ongku Sutan Harahap mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi di Pengadilan Agama Medan sesuai Pasal 18 dari Akad Pembiayaan *Mushārahah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011, disebutkan: “Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama di Medan”.

Kemudian para Penggugat menambahkan dalil lagi yakni disebabkan almarhum Ongku Sutan Harahap telah memenuhi kewajibannya untuk memperoleh fasilitas Akad Pembiayaan *Mushārahah*, yaitu dengan membayar biaya Asuransi Jiwa sebesar Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan melalui Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang melingkupi jenis asuransi jiwa menyebutkan:

“Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kecakapan ini dimiliki oleh subjek hukum sejak ia memasuki usia tamyiz dan berlangsung terus hingga ia meninggal dunia. Hanya saja pada periode tamyiz, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena subjek hukum hanya dapat dipandang sah tindakan hukumnya dalam beberapa kasus tertentu seperti akan dijelaskan kemudian. Oleh karena itu, kecakapan itu dinamakan kecakapan bertindak hukum tidak sempurna.

Bilamana kecakapan menerima hukum dasarnya adalah hidup manusia, maka kecakapan bertindak hukum dasarnya adalah tamyiz. Yaitu kemampuan mengerti atau adanya akal. Hanya saja subjek hukum dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada orang secara individual, tetapi juga meliputi badan hukum, seperti dalam fiqh dikatakan bahwa baitulmal adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, dan baitul maal dapat berutang piutang.

Dalam literatur fikih dan usul fikih ditegaskan bahwa kecakapan bertindak hukum baru dikatakan sempurna sejak subjek hukum memasuki usia dewasa. Menurut jumhur ahli hukum Islam, kedewasaan itu pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik haid, namun bilamana tanda

dengan hukum sehingga anak kecil dilarang untuk terklibat dalam perjanjian secara formal?

Di sini penulis juga menemukan bahwa perjanjian termasuk dalam kategori tindakan hukum. Dalam hukum Islam, untuk dapat dinyatakan sah menurut hukum syariah, suatu tindakan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum. Kecakapan hukum semata tanpa disertai dengan kecakapan bertindak hukum tidak membuat subyek hukum melahirkan akibat hukum. Hanya saja kecakapan bertindak hukum itu terdiri dari dua tingkat, yaitu kecakapan bertindak hukum tidak sempurna dan kecakapan bertindak hukum sempurna. Jadi orang yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna dinyatakan sah seluruh tindakan hukumnya.

Akan tetapi, orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna, yaitu anak mumayiz, tidak dapat seluruh tindakan hukumnya dipandang sah. Perjanjian-perjanjian dan akibat hukumnya dalam kaitan dengan anak mumayiz dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Tindakan yang semata-mata menguntungkan baginya karena memasukkan sesuatu ke dalam kekayaannya tanpa imbalan seperti menerima hibah, menerima wasiat, menerima hasil wakaf dan semacamnya adalah sah tanpa tergantung kepada ratifikasi wali.
- b. Tindakan yang semata-mata merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya tanpa mendapatkan imbalan seperti memberi hibah,

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Pena, 2004
- Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Syafe'I Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Santoso, L. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Siregar, E. I. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Universitas Sumatera Utara: Medan, 2009.
- Siregar, N. H. *Klausul Meninggal Dunia Dalam Akad Perbankan Syariah*. Tesis-- UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2017.
- Soleh, M. *Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi -- UIN Malik Ibrahim: Malang, 2017.
- Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Tamwif, I. *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: UINSA Press, 2014.
- Tanuwidjaja, Henny. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Trimuloto. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. *Analisis Potensi Produk Musharakah terhadap Pembiayaan Sektor Rill UMKM*, 2017.
- Ulum, Fahrul. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2015.
- Wahyudi, A. *Analisis Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Makassar*. Makassar: T.p, 2013.
- NN. "Profil Pengadilan Tinggi Agama Medan", dalam <https://www.pta-medan.go.id/index.php/12-tentang-pta-medan/profil-pta-medan>, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 02 April 2019, Pukul 22.00